

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada hasil analisis yang dilakukan penulis menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel PDRB sesuai dengan hipotesis yang artinya pertumbuhan output suatu daerah mengalami peningkatan berarti terjadi adanya kenaikan produksi, dimana peningkatan produksi tersebut akan memperluas suatu lapangan pekerjaan, maka akan menurunkan jumlah pengangguran.
2. Hasil penelitian pada variabel Pendidikan menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak sesuai maka hipotesis ditolak, yang artinya penyebab kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yaitu kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Walaupun tingkat pendidikannya tinggi akan tetapi jika ekonomi Jawa Barat kurang memadai maka kemiskinan juga akan tetap meningkat, sehingga masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikan tingkat pendidikan dengan baik.

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak sesuai maka hipotesis ditolak, yang artinya belanja daerah tidak menciptakan multiplier yang baik seperti investasi yang produktif. Sehingga belanja daerah tidak menciptakan lapangan kerja pada bidang-bidang tertentu maupun investasi. Pemerintah daerah lebih banyak untuk pengeluaran pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur merupakan dampak jangka panjang terhadap kemiskinan.
4. Dana Alokasi Umum pada hasil analisis yang dilakukan penulis menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel DAU sesuai dengan hipotesis yang artinya DAU digunakan secara efektif serta efisien untuk pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan, disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu melaksanakan pembangunan yang dapat berorientasi terhadap pemerataan pendapatan dengan dilakukannya upaya peningkatan PDRB khususnya mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki pada masing-

masing wilayah, sehingga hasil pemerataan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

2. Pemerintah daerah harus mengecek penyebab kemiskinan di wilayah tersebut, selain itu pemerintah daerah juga berperan dalam pemberlakuan wajib belajar selama 12 tahun. Sehingga masing-masing wilayah dapat merasakan pendidikan.
3. Pemerintah diharapkan dalam belanja daerah lebih dikeluarkan untuk investasi yang lebih produktif dan cepat dalam jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Pemerintah daerah diharapkan menggunakan DAU secara merata tidak hanya untuk belanja pegawai dan jasa saja. DAU juga harus digunakan untuk membenahi bidang kesehatan, pemukiman daerah, dan pendidikan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Belanja Daerah, dan Dana Alokasi Umum.
2. Periode dalam penelitian ini yaitu berjangka 5 tahun dari tahun 2013-2017, sehingga dapat memungkinkan kurang representatif pada hasil penelitian.
3. Objek yang diteliti dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, sehingga hasil yang diperoleh tidak mewakili hasil perhitungan pengaruh kemiskinan yang lebih luas untuk tingkat seluruh Pulau Jawa maupun tingkat nasional.